



A Comparative Study of the Reconciliation Efforts of the Thai and Indonesian Governments in Developing Islamic Education

Sutrisno¹, Fakhruddin², Lukman Asha³

Email: Sutrisno.mhs24@iain.ac.id¹, fakhruddin@iaincurup.ac.id¹², asha.lukman@gmail.com³

Institut Agama Islam Negeri Curup

ABSTRACT

Islam is a minority religion in Thailand. The Muslim population is concentrated in Southern Thailand. As a minority group, Muslims in Thailand especially in the southern region experience various social disparities. Education in Southern Thailand faces gaps and disparities that result in unequal development of Islamic education. This stands in contrast to Indonesia, where the majority of the population is Muslim. These historical and demographic differences have led to different approaches in how the Thai and Indonesian governments reconcile and develop Islamic education.

Keywords: Reconciliation, Islamic education

PENDAHULUAN

Thailand merupakan salah satu negara di Kawasan Asia Tenggara yang memiliki sejarah besar, dikarenakan Thailand merupakan salah satu negara pendiri organisasi ASEAN dan negara yang memiliki sejarah Panjang sebagai negara di kawasan ASEAN yang tidak pernah dijajah. Negara Thailand berbentuk kerajaan dengan 76 provinsi dan jumlah penduduknya 57 juta jiwa. Secara demografi penduduk Thailand terdiri atas etnis Thai, Lao, Khmer, Karen dan Melayu. Agama yang dianut penduduk Thailand 85 % penganut agama Budha dan 4,6 % penganut agama Islam, dan sisanya Atheis dan Kristen. (Hilmin, Dwi Noviani, Lisdaleni, 2023).

Pemeluk Islam di negara Thailand sekitar 90 % terkonsentrasi di wilayah Thailand Selatan yang meliputi empat provinsi mayoritas pemeluk Islam yaitu Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun. Keempat provinsi tersebut 90 % penduduknya memeluk Islam. Islam masuk ke Thailand diperkirakan sekitar abad 10 dan 11 Masehi, diperkuat dengan bukti sejarah penemuan Prasasti berangka tahun 1028 yang menceritakan tentang hubungan Campa dengan Islam. Menurut penulis Portugal Emmanuele Gerendhio E"redevia menyebutkan bahwa Islam masuk ke Thailand sekitar abad ke 10 masehi. (Abdul Hadi Lubis et al., 2024).

Perkembangan Islam di Thailand Selatan merupakan sejarah Panjang yang tidak lepas dari pengaruh politik dan perebutan kekuasaan di Thailand. Pergolakan politik ini tentu saja berimplikasi besar dalam perkembangan Pendidikan Islam di Thailand. Pada abad ke 13 hingga akhir abad ke 14 di Thailand Selatan berdiri kerajaan Islam besar yaitu kerajaan Pattani yang merupakan kerajaan yang menguasai hampir Sebagian besar wilayah Thailand, tetapi pada tahun 1563 kerajaan Pattani berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Thailand yang bercorak Budha. Peristiwa ini menjadi sejarah awal diskriminasi penduduk Islam di Thailand Selatan termasuk pada sektor Pendidikan Islam. (Muslih & Kholis, 2021).

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia berlangsung panjang sejak masuknya Islam di Indonesia abad ke 7 Masehi. Salah satu pola penyebaran islam dilakukan melalui pendidikan. Oleh sebab itu pendidikan Islam di Indonesia tumbuh seiring dengan tumbuh dan berkembangnya agama Islam. Dimasa penjajahan pendidikan Islam mengambil peran besar dalam pendidikan dan perjuangan melalui pendidikan dan organisasi seperti pendidikan Muhammadiyah, organisasi Sarekat Islam. Kemerdekaan Indonesia juga tidak lepas dari perjuangan tokoh tokoh nasional yang kemudian di rumuskan dalam UUD 1945, terutama pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “Atas berkat rahmat Allah”. Pendidikan Islam di Indonesia dikelola oleh Kementrian agama yang berkolaborasi dengan kementrian pendidikan dan kebudayaan. (Umam & Hamami, 2023).

METODE PENELITIAN

Penulisan makalah ini menggunakan metode mengumpulkan bahan dan materi berbagai jurnal, buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pengorganisasian dan kepemimpinan Pendidikan. Metode litaratur yang berhubungan dengan topik yang diminati dan dapat membantu mempermudah dalam merumuskan masalah penelitian, metode ini disebut dengan metode SLR (Systematic literature review). Setelah bahan dikumpulkan kemudian diteliti. Metode litaratur bertujuan untuk membantu menemukan wawasan, kebenaran, dan juga penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Sebagai petunjuk yang terbukti kebenarannya sebaiknya menggunakan jurnal lima tahun terakhir.

Kajian teori

Kekuasaan memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan dan arah Pendidikan negara melalui produk kebijakan yang dibuat. “political Will” pemerintah menjadi komitmen dan dukungan para pemimpin negara untuk memastikan produk kebijakan mampu memberikan kontribusi besar dalam sektor pendidikan. (Monica et al., 2024).

Salah satu teori yang menganalisis peranan kebijakan pemerintah adalah teori politik pendidikan. Teori ini banyak di kemukakan oleh para ahli salah satunya adalah Michael W. Apple. Apple menyebutkan bahwa politik pendidikan merupakan cara bagaimana kekuasaan digunakan dalam mendesain pendidikan, bentuk desain pendidikan merupakan produk kebijakan pendidikan yang di keluarkan oleh pemerintah. Politik pendidikan yang ideal tentunya adalah politik pendidikan yang berpihak kepada rakyat, untuk itu pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan politik pendidikan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kemajuan pendidikan. Kebijakan yang dihasilkan pemerintah akan sangat mempengaruhi perkembangan Pendidikan negara. (Jhon C. Smart, 2019).

Membangun investasi pendidikan melalui modal fisik, regulasi, evaluasi, dan akuntabilitas dapat di wujudkan melalui kebijakan pemerintah yang konsisten untuk memajukan pendidikan. Paket kebijakan pendidikan menjadi modal penting dalam meningkatkan akselerasi, akses, dan mutu pendidikan. Untuk itu diperlukan niat baik “political Will” pemerintah dalam mengembangkan pendidikan secara menyeluruh. (Harahap & Rajab, 2022).

Teori politik pendidikan merupakan teori yang menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah menjadi faktor utama perkembangan pendidikan. Kebijakan pemerintah dapat menentukan arah, stigma dan orientasi pendidikan di suatu negara manapun di dunia. Kebijakan pemerintah menjadi kunci Pembangunan pendidikan, pembangunan pendidikan juga menjadi kunci dalam peningkatan SDM. (Joseph P. Healey, 2012).

Teori politik pendidikan relevan dengan menganalisis pembangunan manusia melalui kebijakan pemerintah. Peneliti akan menggunakan pendekatan teori politik pendidikan dalam menganalisis rekonsiliasi pemerintah Thailand dan Indonesia dalam membangun pendidikan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk rekonsiliasi pemerintah Thailand dalam memajukan pendidikan Islam menjadi terlihat dari kebijakan pemerintah Thailand dari masa ke masa yang progresif. Perubahan kebijakan pendidikan Islam di Thailand Selatan mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi politik dan sosial di setiap masanya. Dampak dari kebijakan pemerintah Thailand tersebut tercermin dari perkembangan dan kualitas pendidikan Islam di Thailand Selatan baik dari manajemen, SDM dan pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Berdasarkan data dan fakta sejarah kebijakan pendidikan Islam di Thailand yang membuka akses dalam perkembangan pendidikan Islam menjadi barometer dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan Islam di Thailand Selatan. Perubahan kurikulum, peningkatan akses pendidikan merupakan bentuk kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan Islam di Thailand Selatan.

Perubahan paradigma pendidikan negara Thailand menjadikan rekonsiliasi pemerintah Thailand dan Pemeluk Islam di Thailand Selatan menjadi lebih terbuka, harmonis dan damai. Sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah Thailand membuka dukungan terhadap perkembangan pendidikan Islam di Thailand Selatan. Rekonsiliasi juga berdampak pada stabilitas politik, ekonomi sehingga dapat menciptakan integrasi bangsa di Thailand.

Rekonsiliasi pemerintah terhadap pendidikan Islam di Indonesia memiliki perbedaan besar dengan Thailand, ini disebabkan oleh perbedaan sejarah dan demografi kedua negara. Islam di Indonesia mengambil peranan besar terhadap pembentukan identitas kebangsaan dan membentuk nilai-nilai agama dan budaya di Indonesia. Islam di Thailand merupakan minoritas sehingga sejarah pengembangan pendidikan Islam mengalami dinamika yang sangat ditentukan kondisi politik dan kebijakan pemerintah. Ini sejalan dengan teori politik pendidikan Michael W. Apple, Apple menyebutkan bahwa politik pendidikan merupakan cara bagaimana kekuasaan digunakan dalam mendesain pendidikan, bentuk desain pendidikan merupakan produk kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pembahasan

Upaya rekonsiliasi pemerintah Thailand dalam membangun Pendidikan Islam

Jenderal Thailand Phibun Sonkhram pada tahun 1938 berupaya menghapus identitas Islam di Thailand Selatan melalui kebijakan Ransyom (revolusi Budaya) yang ditujukan menciptakan budaya Thailand yang satu dan unggul. (Djamil et al., 2022). Kebijakan ini dikenal juga dengan nama kebijakan 'siamisasi' yang merujuk dari suku Siam sebagai suku terbesar di Thailand. Kebijakan ini dianggap oleh melayu Pattani di Thailand Selatan sebagai upaya menyingkirkan mereka dari kehidupan negara Thailand. Semua penduduk Thailand dari suku manapun diwajibkan menggunakan nama Thailand, dan berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Thailand.

Perjuangan dan pergerakan Umat Islam di Thailand selatan masa periode tahun 1930 hingga 1950 mengalami dinamika yang kompleks. Periode tahun 1940 situasi politik, militer dikuasai ASEAN yang menghadapi perlawanan imperialisme dan kolonialisme Inggris terutama Pembentukan federasi Malaya yang dianggap kerajaan Thailand sebagai bentuk ancaman sehingga kerajaan Thailand menuding umat Islam di Pattani berafiliasi dengan federasi Malaya. Periode tahun 1950 kawasan ASEAN menghadapi dampak perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, isu perkembangan komunisme di ASEAN menjadi ancaman nyata pada periode ini. sebagaimana negara Vietnam pecah antara Vietnam Selatan dan Utara. Pada periode 1950 pemerintah Thailand berupaya agar ideologi komunis tidak masuk ke Thailand dengan memperkuat Kerjasama dengan negara tetangga seperti Malaysia. (Harahap & Rajab, 2022).

Pada periode 1930 hingga 1950 perjuangan umat Islam di Thailand Selatan belum mendapatkan perhatian dari dunia dan pemerintah Thailand, karena pada periode tersebut Kawasan ASEAN sedang menghadapi perlawanan penjajah, isu global seperti perang dingin, dan isu ideologi komunis. Pada periode ini umat Islam Thailand Selatan mengalami diskriminasi sebagai minoritas di negara Thailand. Pendidikan Islam di Thailand Selatan pada periode ini tidak terarah, dan tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah Thailand sehingga madrasah, pondok yang sudah ada tidak bekerja secara optimal dalam membangun pendidikan Islam di Thailand Selatan. (Azani et al., 2025).

Pada periode tahun 1990-an pemerintah Thailand berupaya melakukan rekonsiliasi dengan etnis melayu di Thailand Selatan. Kerajaan Thailand membuka akses politik, dan kekuasaan bagi etnis melayu untuk berperan serta aktif dalam pemerintahan. Kerajaan Thailand mengubah sistem pemerintah eksklusif menjadi inklusif dan terbuka bagi etnis melayu. Tokoh melayu Islam di Thailand Selatan pada tahun 1990 mulai menduduki posisi strategis dalam pemerintahan kerajaan Thailand. (Purnomo et al., 2023).

Eksisitensi umat islam di Thailand mulai diakui pemerintahan kerajaan Thailand, seperti Jabatan wakil menteri luar negeri diduduki oleh Surin Pissawan, Menteri luar negeri Muhammad Norr Mata menjabat ketua parlemen Thailand, dan wakil menteri dalam negeri dijabat oleh Haji Slon. Upaya ini tentu saja sebagai Langkah politik kerajaan Thailand sekaligus rekonsiliasi demi membuka akses politik, demokrasi dan menghapus stigma diskriminasi terhadap umat Islam selama periode sebelumnya. Pada tahun 1996 kerajaan Thailand meningkatkan keterlibatan etnis melayu dalam menyusun konstitusi terutama yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan pendidikan. Namun penerapan konstitusi tersebut terhalang oleh krisis moneter yang melanda Asia dan dunia sehingga berdampak pada kondisi politik dan ekonomi Thailand. (Djamil et al., 2022).

Pada tahun 2001 di Thailand terdapat pencurian 300 senjata di kompleks tantara Chiron Narathiwat yang menimbulkan permasalahan keamanan nasional Thailand. Peristiwa ini menewaskan empat anggota militer Thailand. Peristiwa ini membuat wilayah Thailand Selatan mendapatkan perhatian khusus karena pemerintah curiga ini terkait dengan Gerakan terorisme karena bertepatan dengan peristiwa WTC di Amerika Serikat. Kebijakan pendidikan yang sudah dirancang belum dapat sepenuhnya dijalankan di Thailand Selatan masa itu karena pemerintah Thailand dan dunia internasional mencurigai keterlibatan teroris yang salah satunya di curigai berpusat di Thailand Selatan. Kondisi politik diatas menyebabkan rekonsiliasi yang dibangun mengalami kemunduran yang signifikan, terlihat dari beberapa peristiwa yang menunjukkan potensi perpecahan antar etnis di Thailand seperti pada tahun 2004 terjadi penembakan di masjid krisk pada April 2004 yang menewaskan 107 jiwa. Kemudian peristiwa Tak Bai pada 25 Oktober 2004 yang menewaskan 100 orang melayu di Thailand Selatan. (Djamil et al., 2022).

Pada tahun 2010 pemerintah Thailand merekonstruksi ulang perdamaian politik di Thailand Selatan dengan melibatkan negara Malaysia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan etnis melayu di Thailand Selatan. Pemerintah Malaysia turut andil dalam menjaga perbatasan. Upaya rekonsiliasi pemerintah Thailand di Kawasan Thailand Selatan hingga saat ini terus diupayakan di tengah tengah tantangan situasi politik lokal dan nasional. (Purnomo et al., 2023).

Rekonsiliasi sektor pendidikan dilakukan pemerintah Thailand dengan mengatasi kesenjangan pendidikan antar penduduk terutama di kawasan Thailand Selatan. Reformasi yang dilakukan antara lain: (1) Desentralisasi pendidikan, (2) Perluasan wajib belajar secara merata, (3) reformasi Kurikulum di semua jenjang, (4) Mendirikan lembaga penjamin mutu pendidikan officer for National Education Standards and Quality assessment (ONESQA). Upaya ini

dilakukan dengan tujuan mengurangi disparitas pendidikan yang dialami oleh penduduk Thailand Selatan. (Abdul Hadi Lubis et al., 2024)

Proses pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) di Thailand dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada siswa. Proses pendidikan agama Islam di Thailand berpusat di kawasan Thailand Selatan yang menggunakan dua Lembaga pendidikan yaitu: (1) Pondok, merupakan Lembaga pendidikan Islam tertua terletak di Pattani diantaranya pondok Dala, bermin, Dual, Kota, Gersih, Telok Manoh. (2) madrasah, merupakan lembaga pendidikan sekolah swasta. Pola pendidikan di madrasah sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat Thailand Selatan, dibuktikan banyak lulusan madrasah yang melanjutkan ke jenjang Perguruan tinggi di dalam negeri bahkan hingga ke luar negeri, seperti di College study of Islam Universitas pangeran Songkia, Internasional university Malaysia, School of Islamic and social sciences di virginia USA. Perkembangan madrasah menjadi momentum bagi pendidikan Islam di Thailand Selatan untuk melakukan modernisasi pendidikan islam. (Djamil et al., 2022).

Kebijakan pendidikan pemerintah Thailand seperti desentralisasi pendidikan, membuka akses pendidikan secara merata, dan reformasi kebijakan pendidikan menyebabkan proses modernisasi pendidikan Islam di Thailand Selatan semakin progresif dan cepat. Pendirian Ma'had attarbiyah dari pondok menjadi madrasah modern. Madrasah ini menggabungkan pendidikan Islam dengan pendidikan umum serta adaptif terhadap perubahan zaman. Berdirinya madrasah Ar-Rahmaniyah Patani yang menggabungkan antara pendidikan umum dan agama Islam. Madrasah ini membuka jenjang pendidikan dari tingkat PAUD hingga madrasah Tsanawiyah. (Azani et al., 2025).

Rekonsiliasi pemerintah Thailand dalam membangun pendidikan di Thailand Selatan menunjukkan bahwa membangun SDM melalui sektor pendidikan memerlukan regulasi yang berpihak dari pemerintah. Paket kebijakan pendidikan menjadi faktor penting dalam membangun pendidikan, karena pemerintah memiliki kekuasaan untuk menciptakan aturan dan kebijakan yang bisa membuka akses inovasi, dan transformasi Lembaga pendidikan. Ini sejalan dengan teori politik pendidikan yang dikemukakan oleh Apple yang menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah menjadi faktor penting dalam membangun SDM.

Upaya rekonsiliasi pemerintah Indonesia dalam membangun pendidikan Islam.

Agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut di Indonesia. Sejarah panjang Islam di Indonesia dimulai dari abad ke 7 masehi. Agama Islam masuk ke Nusantara melalui berbagai jalur diantaranya perdagangan, taswuf, seni dan pendidikan. Jalur pendidikan merupakan salah satu jalur penting terhadap perkembangan agama Islam, diawali pendidikan melalui surau surau, masjid hingga melahirkan pondok pesantren yang dikembangkan berbagai tokoh Islam seperti Sunan ampel yang mendirikan pesantren, pesantren Tegalsari didirikan oleh Kiai Ageng Muhammad Bestari tahun 1742. (Arief, 2022).

Pada masa penjajahan pendidikan Islam mendapatkan tantangan dari penjajah kolonial karena dianggap ancaman bagi kekuasaan penjajah, oleh sebab itu Belanda berupaya memecah belah umat Islam. Salah satunya adalah pecahnya organisasi sarekat Islam menjadi Sarekat Islam merah berideologi komunis dan Sarekat Islam Putih berideologi nasionalis-religius. Pendidikan Islam dimasa kolonial berperan besar dalam membentuk persatuan dan identitas kebangsaan seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan. (Siahaan et al., 2019)

Islam dimasa kemerdekaan berperan besar dalam proses kemerdekaan terlihat dari andil tokoh Islam dalam perjuangan proklamasi kemerdekaan seperti Ki Bagus Hadikusumo ketua Muhammadiyah yang menjadi anggota BPUPKI, KH. Wahid Hasyim Pimpinan Nadhatul Ulama menjabat sebagai anggota BPUPKI dan PPKI yang berperan dalam perumusan piagam Jakarta. Oleh sebab itu dalam pembukaan UUD 1945 nilai nilai religiusitas digunakan dalam Alinea 3 yang terdapat kalimat "atas berkat rahmat Allah ". (Muslih & Kholis, 2021).

Sejarah panjang pendidikan dan peran Islam diatas menjadikan nilai nilai Islam, kultur Islam melekat dalam kehidupan sehari hari masyarakat Indonesia. Pendidikan islam di Indonesia dikelolI oleh Kementrian Agama dan berkolaborasi dengan kementrian Pendidikan dan kebudayaan. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan pendidikan umum. Pendidikan islam di Indonesia dilakukan di semua jenjang pendidikan pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah atas. Sekolah sekolah Islam seperti pesantren tradisional dan modern, Madrasah hingga pola pendidikan Islam modern seperti boarding scholl terus tumbuh dan berkembang serta memadukan antara pendidikan umum dan pendidikan Islam. (Monica et al., 2024).

Dari rekonsiliasi pemerintah Thailand dan Indonesia diatas menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam membangun pendidikan Islam signifikan dalam menentukan kemajuan pendidikan Islam. Arah kebijakan yang dirumuskan pemerintah dalam bentuk kebijakan, aturan dan regulasi pendidikan islam akan membangun pendidikan Islam. Ini sejalan dengan teori politik pendidikan yang dikemukakan oleh Michael W. Apple yang menyebutkan bahwa politik pendidikan merupakan cara bagaimana kekuasaan digunakan dalam mendesain pendidikan, bentuk desain pendidikan merupakan produk kebijakan pendidikan yang di keluarkan oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Rekonsiliasi politik pemerintah Thailand dan Indonesia dalam mengembangkan pendidikan terdapat perbedaan besar. Ini disebabkan oleh perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang secara historis dan budaya kental dengan nilai nilai Islam. Sedangkan di Thailand pendidikan Islam mengamani dinamika yang panjang dan sangat ditentukan oleh situasi politik masa itu. Pemerintah Indonesian mengembangkan pendidikan Islam sejalan dengan perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam di Indonesia, Pendidikan Islam di Kelola oleh kementrian pendidikan dan kementrian agama. Pelajaran Islam menjadi pelajaran wajib yang harus ditempuh pelajar dari tingkat dasar hingga tingkat atas. Pemerintah Thailand mengembangkan pendidikan melalui rekonsiliasi pemerintah Thailand setelah melalui proses politik antara pemerintah dan umat Islam Thailan khususnya di Thailand Selatan. Oleh sebab itu tingkat perkembangan pendidikan Islam di Thailand dan Indonesia berbeda secara progress nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi Lubis, Helmiati, & M.Nazir Karim. (2024). Transformasi Pendidikan Islam di Pattani, Thailand Selatan: Kebijakan dan Dampaknya di Tengah Konflik. *Journal of Islamic Education El Madani*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.55438/jiee.v4i1.129>
- Arief, M. (2022). Pendidikan Islam di Indonesia (Kajian Upaya Pemberdayaan Dan Rekonstruksi). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(4), 1377. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i4.1107>
- Azani, A., Mislaini, Yuni, S. R., & Rambe, S. (2025). Sistem Pendidikan di Thailand. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 1(1), 243–259.
- Djamil, N., Rajab, K., & Helmiati, H. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Negara yang dilanda Konflik: Studi Kasus di Pattani Thailand. *Jurnal EL-RIYASAH*, 12(2), 171. <https://doi.org/10.24014/jel.v12i2.15522>

- Harahap, K. S., & Rajab, K. (2022). Analysis of Islamic Educational Policy : *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 06(01), 54–64.
- Hilmin, Dwi Noviani, Lisdaleni, M. N. (2023). *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Pendidikan Islam Di Thailand Dan Indonesia*. 1(1), 51–70.
- Jhon C. Smart, M. B. P. (2019). *Higher Educations : Handbook Theory and Research* (26th ed.). Springer.
- Joseph P. Healey. (2012). *Diverty and society* (12th ed.). Pine Foge Press.
- Monica, S., Dompok, T., & Salsabila, L. (2024). Analisis Perbandingan Pendidikan Agama Islam Di Indonesia Dan Thailand: Studi Faktor-Faktor Penghambat Penyebaran Islam Di Thailand. *Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK) 6 Tahun 2024*, 158–163. <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/prosiding/article/view/9324>
- Muslih, M., & Kholis, N. (2021). Telaah Komparatif Kurikulum Lembaga Pendidikan Islam di Singapura dan Thailand. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 9(2), 191–212. <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i2.191>
- Purnomo, D., Sultan Syarif Kasim Riau, U., Soebrantas NoKm, J. H., Pekanbaru, K., Pane, I., & Dar Aswaja Rokan Hilir Riau Jl Ibadah Syekh Muda Madlawan Desa Sungai Pinang Kec Kubu Babussalam Kab Rokan Hilir Riau, I. (2023). Perbandingan Pendidikan Islam di Indonesia dan Thailand Comparison of Islamic Education in Indonesia and Thailand. *EDUCATE : Journal of Education and Culture*, 29–33.
- Siahaan, A., Sari, R. M., & Shopiana. (2019). Sejarah dan Tokoh Pemikir Mutu. *Sabilarraspad*, 4(2), 1–15.
- Umam, M. R., & Hamami, T. (2023). Evaluasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Dan Madrasah. *At-Ta'Dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 15(1), 1–16. <https://doi.org/10.47498/tadib.v15i1.1556>